



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

I. DATA PRIBADI

- Nama** : R. KURMAWAN
- Jabatan** : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
- NHK** : 756450

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.685.200.000**

- Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA TERNATE , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
- Tanah Seluas 336 m2 di KAB / KOTA KOTA KENDARI , HASIL SENDIRI Rp. 235.200.000
- Tanah Seluas 381 m2 di KAB / KOTA KOTA KENDARI , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **19.000.000**

- MOTOR, HONDA VARIO 160 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **221.800.000**

D. SURAT BERTHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **340.000.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **2.266.000.000**

III. HUTANG **Rp.** **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **2.266.000.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.